

ANALISIS PENGARUH PDRB PERKAPITA, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT), DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI LAMPUNG

Fanny Cantika Roseline, Emi Maimunah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: fanny.cantika1009@students.unila.ac.id, emi_syam@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh PDRB Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode Tahun 2017-2021. Sampel penelitian mencakup 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode tahun 2017-2021. Metode regresi panel menggunakan Random Effect Model digunakan untuk menyelidiki pengaruh pengaruh PDRB Perkapita, TPT dan IPM terhadap Tingkat Kemiskinan di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode Tahun 2017-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, variabel PDRB Perkapita dan IPM masing-masing mempunyai pengaruh negatif dan signifikan, sedangkan variable TPT mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode Tahun 2017-2021.

Kata Kunci: PDRB Perkapita, TPT, IPM, Tingkat Kemiskinan, Lampung

Abstract

This study aims to examine the effect of per capita GRDP, Open Unemployment Rate (TPT) and Human Development Index (IPM) on Poverty Rates in 15 Regencies/Cities in Lampung Province for the 2017-2021 period. The research sample includes 15 Regencies/Cities in Lampung Province for the 2017-2021 period. The panel regression method using the Random Effect Model is used to investigate the effect of Per Capita GRDP, TPT and HDI on Poverty Levels in 15 Regencies/Cities in Lampung Province for the 2017-2021 Period. The results showed that the Per Capita GRDP and HDI variables each had a negative and significant influence, while the TPT variable had a positive and significant impact on the Poverty Rate in 15 Regencies/Cities in Lampung Province for the 2017-2021 period.

Keywords: PDRB Per Capita, TPT, HDI, Poverty Level, Lampung.

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah utama yang ingin dituntaskan oleh berbagai negara di seluruh dunia. Pemerintah di negara manapun di dunia, bahkan negara maju masih sulit untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sehingga upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Sebab pengentasan

kemiskinan menjadi salah satu indikator penting dari keberhasilan pembangunan.

Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang secara ekonomi diukur dari pendapatan atau pengeluaran. Amartya Sen, peraih hadiah Nobel Ekonomi, berargumen bahwa kemiskinan biasanya ditandai dengan kegagalan individu mendapatkan kapabilitas dasar, yang menyebabkan tiadanya

kesempatan dan pilihan untuk hidup secara bermartabat.

Bank Dunia dalam publikasinya, *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty*, mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan dengan standar kehidupan layak tidak tercapai. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam publikasinya, *The World Situation Report 1997*, menggambarkan kemiskinan sebagai kondisi yang berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disarikan definisi kemiskinan sebagai kondisi ketika taraf hidup seseorang dianggap lebih rendah dari standar kemiskinan yang dikenal sebagai garis kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama kebijakan pemerintah Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen untuk mencapai tujuan pertama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*, yaitu menghapus kemiskinan. Tersedianya angka kemiskinan yang akurat di setiap wilayah dan dapat diperbandingkan di tingkat nasional merupakan syarat mutlak dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi Di Indonesia juga menjadikan kemiskinan sebagai permasalahan yang utama akan tetapi belum mempunyai strategi yang kuat untuk mengatasi kemiskinan.

Permasalahan kemiskinan di Provinsi Lampung adalah, masih tingginya angka kemiskinan Provinsi Lampung jika di bandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Sumatera. Tingginya jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung menempati peringkat ketiga dalam jumlah tertinggi angka kemiskinan dari sepuluh Provinsi

yang ada di Pulau Sumatera. Tingginya jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung menempati peringkat keempat dalam jumlah tertinggi angka kemiskinan dari sepuluh Provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin di Lampung adalah 13,04 persen berada di urutan keempat setelah Provinsi Sumatera Selatan dengan angka 13,10 persen, Bengkulu dengan angka 15,59 persen dan Aceh sebesar 15,92 persen. Hal yang sama masih terjadi sampai dengan tahun 2021 meskipun nilai persentasenya turun.

Menurut (Ginting & Dewi, 2013), berdasarkan teori lingkaran kemiskinan (*Vicious circke of poverty*) yang diperkenalkan Nurks. terdapat tiga faktor utama penyebab kemiskinan yaitu : (i) Adanya keterbelakangan dan tertinggalan sumber daya manusia (SDM) yang tercermin dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia, (ii) Ketidak sempurnaan pasar, dan, (iii) Kurangnya modal dan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima (tercermin oleh laju PDRB Per Kapita). Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi akan berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (tercermin oleh tingginya angka pengangguran).

Faktor paling utama yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan menyebabkan kemiskinan adalah PDRB adalah PDRB per kapita. Pendapatan membuat masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup terutama kebutuhan pokok. Pendapatan masyarakat di suatu wilayah dapat diukur dari pendapatan per kapita, (Safitri & Aliasuddin, 2016). Pendapatan per kapita sendiri adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu

wilayah pada periode tertentu yang dihitung dari pendapatan periode tertentu dibagi dengan jumlah populasi di wilayah tersebut, (Maulidah & Soejoto, 2015). Apabila pendapatan masyarakat menurun maka sulit bagi masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, (Hanum & Sarlia, 2019). Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut, Simanjuntak, 2001. Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang.

Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan menyebabkan kemiskinan adalah seberapa besar jumlah pengangguran yang ada di suatu wilayah tersebut. Dalam konsep pengangguran terdapat pengangguran terbuka (*open unemployment*) yaitu tenaga kerja yang menganggur penuh. Dalam penelitian yang dilakukan (Made et al., 2016) , serta (Yacoub, 2013), memperoleh hasil bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini memiliki makna bahwa semakin tinggi tingkat kesempatan kerja, maka akan semakin rendah tingkat kemiskinan masyarakat. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat kesempatan kerja, maka akan semakin tinggi tingkat kemiskinan masyarakat suatu daerah. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin banyak peluang kesempatan kerja yang tersedia bagi masyarakat, maka dapat mengurangi tingkat kemiskinan di suatu daerah. Apabila kesempatan kerja luas dan semakin banyak menyerap tenaga kerja, maka masyarakat miskin akan semakin berkurang. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Suharyanto et al., 2017) dengan

objek penelitian Kabupaten Deli Serdang. Mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran di suatu wilayah maka akan berdampak pada kemiskinan di wilayah tersebut, (Choirur, 2021).

Faktor terakhir yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan menyebabkan kemiskinan adalah kualitas sumber daya manusia yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut pandangan *The United Nations Development Programme* (UNDP) merumuskan pembangunan manusia sebagai pilihan untuk manusia dalam meningkatkan kesempatan mereka dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan penghasilan serta pekerjaan (Sisnita & Prawoto, 2017). Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh PDRB per kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deksriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas (*independent variable*) yaitu PDRB Per kapita (X1), Tingkat Pengangguran Terbuka (X2), dan Indeks Pembangunan Manusia (X3) serta satu variabel terikat (*dependent variable*) yakni Tingkat Kemiskinan (Y) di 15

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
 Periode Tahun 2017-2021.

2. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan sampel 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yaitu, Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Way Kanan, Tulangbawang, Pesawaran, Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

3. Pengukuran Variabel Penelitian

Untuk memberikan arah penelitian ini, berikut adalah penjelasan variabel yang menjadi pusat analisis.

1. Kemiskinan

Menurut (Ferezagia, 2018), penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

2. PDRBPer Kapita

Pendapatan perkapita atau PDRB perkapita adalah hasil bagi dari pendapatan regional dengan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita sering dijadikan sebagai parameter kemakmuran dan tingkat keberhasilan pembangunan karena dengan

pendapatan perkapita di suatu negara yang semakin besar maka negara tersebut dinilai semakin makmur.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah presentasi jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja. Satuan indeks TPT dalam penelitian ini ialah persentase.

4. Indeks Pembangunan Manusia (TPAK)

Menurut UNDP, IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang terangkum dari pendekatan tiga dimensi dasar manusia yaitu meliputi umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan/pendidikan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Data IPM yang dipakai dalam penelitian ini adalah data Indeks Pembangunan Manusia metode baru (dalam satuan indeks) yang diambil dari publikasi BPS pusat.

4. Teknik Analisis

Model ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$TK2_{it} = \beta_0 + \beta_2 PDRB_{it} + \beta_1 TPT_{it} + \beta_3 IPM_{it} + e_{it}$$

di mana:

TK	: Tingkat Kemiskinan (%)
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto per kapita (Rupiah)
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)
β_0	: Intersep atau Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas
i	: 1, 2, 3 ..., 10 (data <i>cross section</i> 15 Kabupaten/Kota)
t	: 1, 2, 3 ... 8 (data time series, tahun 2017-2021)
e	: <i>Error term</i>

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Provinsi Lampung berdiri pada tanggal 18 Maret 1964 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1964 yang kemudian menjadi Undang-undang No 14 tahun 1964. Pada awal berdirinya tahun 1964, Provinsi Lampung baru terdiri atas 4 kabupaten/kota. Pemekaran wilayah mulai dilakukan sejak tahun 1991 yaitu dengan bertambahnya Kabupaten Lampung Barat. Proses pemekaran wilayah sempat 5 kali dilakukan, terakhir berdasarkan UU No. 22 tahun 2012 tentang dasar hukum pembentukan wilayah administrasi Provinsi Lampung. Saat ini, Provinsi Lampung dibagi dalam 15 (lima belas) Kabupaten/Kota yang selanjutnya terdiri dari beberapa wilayah Kecamatan.

2. Kondisi Geografi

Provinsi Lampung terletak pada 103°40' sampai 105°50' Bujur Timur dan 6°45' sampai 3°45' Lintang Selatan, disebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, sebelah Selatan dengan Selat Sunda, sebelah Timur dengan Laut Jawa dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Daerah Lampung memiliki luas dataran 35.288,35 Km² termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian sebelah paling ujung tenggara pulau Sumatera.

3. Kondisi Topografi

Secara topografi, Lampung terdiri atas daerah berbukit sampai bergunung dengan kemiringan >500 mdpl; daerah berombak sampai bergelombang dengan kemiringan 8%-15% dan ketinggian 300-500 mdpl; daerah dataran alluvial dengan kemiringan 0%-3% dan ketinggian 25-75 mdpl; daerah dataran rawa pasang surut dengan ketinggian 0,1-1 mdpl; dan daerah river basin. Meskipun demikian, sebagian besar topografinya berada pada kemiringan kurang

dari 15% sehingga membuat daerah Lampung memiliki beberapa potensi alam yang dapat diandalkan.

4. Kondisi Kependudukan

Lampung memiliki dua suku asli atau disebut dengan masyarakat adat yaitu masyarakat adat Saibatin dan Pepadun. Masyarakat Adat Sai batin seringkali juga dinamakan Lampung Pesisir karena sebagian besar berdomisili di sepanjang pantai timur, selatan dan barat Lampung. Sedangkan masyarakat adat Pepadun biasa disebut dengan Lampung Pedalaman. Provinsi Lampung memiliki motto dalam lambang daerahnya, motto ini berbunyi "Sang Bumi Ruwa Jurai". Sang Bumi diartikan sebagai rumah tangga yang agung yang berbilik, sedangkan Ruwa Jurai diartikan sebagai dua unsur 53 golongan masyarakat yang berdiam di wilayah Provinsi Lampung.

5. Gambaran Umum Daerah Penelitian

a. Deskripsi Data Kemiskinan di Provinsi Lampung

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks dan sering terjadi dalam suatu wilayah. Oleh karena itu upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Masalah kemiskinan di suatu wilayah ini terus menjadi masalah, termasuk di Provinsi Lampung. Rata-rata tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung pada tahun 2017-2021 dimana rata-rata tingkat kemiskinan tertinggi ada pada Kabupaten Lampung Utara sebesar 20,2 persen dan rata-rata tingkat kemiskinan terendah ada pada Kabupaten Mesuji sebesar 7,5 persen. Dengan tingkat kemiskinan yang sangat mengkhawatirkan ini angka masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan

dasarnya relatif tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lainnya.

b. Deskripsi Data PDRB di Provinsi Lampung

PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode. Rata-rata PDRB di Provinsi Lampung pada tahun 2011-2017 dimana rata-rata PDRB tertinggi ada pada Kabupaten Tulang Bawang dan Bandar Lampung sebesar 34,9 juta rupiah, sehingga dalam hal ini kedua wilayah tersebut memiliki tingkat perekonomian yang cenderung lebih baik dibandingkan wilayah lainnya, sedangkan rata-rata PDRB terendah ada pada Kabupaten Lampung Barat sebesar 16,1 juta rupiah.

c. Deskripsi Data TPT di Provinsi Lampung

Menurut (Adriyanto et al., 2020) pengangguran adalah orang yang tergolong Angkatan kerja, ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperoleh pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah *persentase* jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Rata-rata tingkat pengangguran terbuka menurut kota/kabupaten di Provinsi Lampung 2017-2021 menunjukkan bahwa kota Bandar Lampung merupakan wilayah dengan tingkat pengangguran tertinggi sebesar 8 persen sedangkan tingkat pengangguran terendah sebesar 2,1 persen berada di kabupaten Lampung Barat. Hal ini umumnya terjadi dikarenakan masih banyak masyarakat yang beranggapan dapat memperbaiki nasib di kota, sehingga banyak masyarakat melakukan transmigrasi dari desa ke kota, setiba di kota ia tidak memiliki kemampuan yang cukup sehingga banyak

yang menjadi pengangguran yang berada di kota Bandar Lampung.

d. Deskripsi Data IPM di Provinsi Lampung

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung 2017-2021 dimana IPM tertinggi berada di Kota Bandar Lampung sebesar 77, sedangkan nilai IPM terendah berada pada Kabupaten Pesisir Barat dan Mesuji dengan nilai sebesar 63,2. Hal ini dapat terjadi dikarenakan umumnya kehidupan di daerah perkotaan atau kawasan yang lebih maju memiliki fasilitas Pendidikan maupun Kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan kawasan pedesaan yang umumnya banyak berada di kabupaten.

e. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Terdapat 3 model regresi dalam data panel yakni, *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Pemilihan model terbaik regresi data panel melalui tiga pengujian, yakni Uji Chow, Uji Lagrange Multiplier (LM), dan Uji Hausman. Untuk memilih antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM) dilakukan Uji *Chow*, selanjutnya dilakukan uji perbandingan CEM atau *Random Effect Model* (REM), dan yang terakhir untuk memilih antara FEM atau REM dilakukan Uji Hausman.

Tabel 1
Pemilihan Model Regresi Data Panel

Uji	Prob	Keputusan
Chow	0.0000	FEM
Lagrange Multiplier (LM)	0.0000	REM
Hausman	0.1603	REM

Sumber: Output EViews 10

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan maka model terbaik yang dipilih untuk menganalisis pengaruh PDRB Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode Tahun 2017-2021. Adalah *Random Effect* t dibandingkan dengan model *Fixed Effect* dan *Common Effect*.

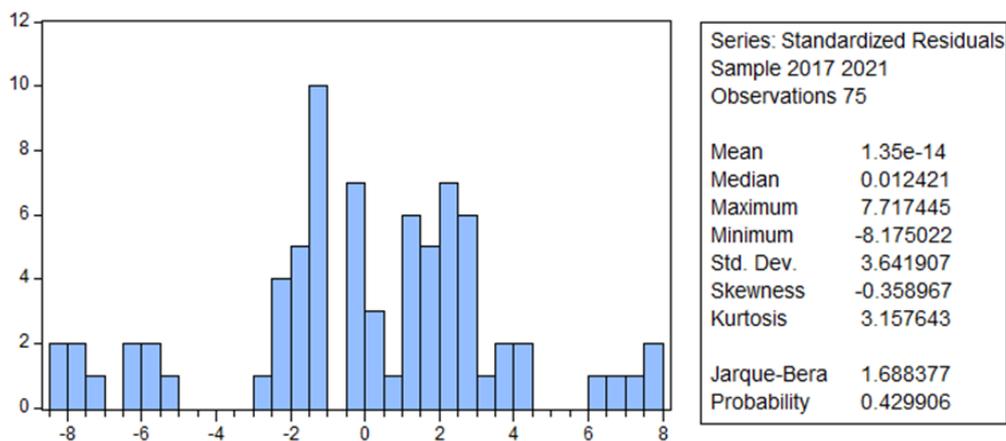
6. Pengujian Asumsi Klasik

Terdapat empat uji asumsi klasik yakni: uji normalitas, deteksi

multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

7. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas di atas menunjukkan nilai probabilitas jarque bera sebesar 0,429906 dimana lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,05), sehingga residual berdistribusi normal.



Gambar 1

Hasil Uji Normalitas

Sumber: Output EViews 10

8. Uji Multikolinieritas

Berdasarkan Tabel 2, dapat terlihat bahwa tidak terdapat variabel yang memiliki nilai korelasi lebih dari

0.85. Sehingga dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas

	PDRB	TPT	IPM
PDRB	1.000000	0.333521	0.277670
TPT	0.333521	1.000000	0.660399
IPM	0.277670	0.660399	1.000000

Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan Eviews 10, 2022

9. Uji Heterokedastisitas

Dari hasil regresi di atas menggunakan uji Glejser dapat disimpulkan bahwa model REM yang digunakan dalam penelitian ini bebas

dari heteroskedastisitas karena nilai dari masing-masing variabel dependen X1, X2, dan X3 lebih besar dari $\alpha=$ (5%).

Tabel 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.666227	3.772164	2.562515	0.0125
PDRB	0.018300	0.024178	0.756889	0.4516
TPT	-0.083527	0.053103	-1.572932	0.1202
IPM	-0.102899	0.055747	-1.845835	0.0691

Sumber: Output EViews 10

10. Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji Durbin Watson diatas, nilai Durbin Watson stat sebesar 1,393654. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat autokorelasi positif.

Analisa harus menjawab masalah penelitian dimuka dan mengkonfirmasi hipotesa apakah diterima atau ditolak

bagi penelitian kuantitatif. Jelaskan pula pembatasan masalah dalam penelitian ini, hambatan penelitian serta kegunaan penelitian ini selanjutnya. Dan jelaskan manfaat penerapan penelitian ini bagi perusahaan atau bagi ilmu pengetahuan di bidang yang diteliti.

Tabel 4
Uji Autokorelasi

R-squared	0.644872	Mean dependent var	0.492925
Adjusted R-squared	0.629867	S.D. dependent var	0.521827
S.E. of regression	0.317472	Sum squared resid	7.155976
F-statistic	42.97598	Durbin-Watson stat	1.393654
Prob(F-statistic)	0.000000		

Output EViews 10

Menurut (Latuconsina, 2017), adanya autokorelasi menyebabkan estimator bersifat LUE bukan BLUE

dengan konsekuensi perhitungan standard error metode OLS tidak dapat dipercaya kebenarannya. Ada beberapa

cara untuk menghilangkan autokorelasi, salah satunya yaitu metode first

difference. Berikut adalah hasil dari metode *first difference*:

Tabel 5
Hasil Uji Durbin Watson First Difference

R-squared	0.243297	Mean dependent var	-0.241000
Adjusted R-squared	0.202759	S.D. dependent var	0.408883
S.E. of regression	0.365085	Sum squared resid	7.464074
F-statistic	6.001750	Durbin-Watson stat	1.984745
Prob(F-statistic)	0.001278		

Sumber: Output EViews 10.

Berdasarkan hasil uji *first difference* diatas, nilai Durbin-Watson = 2,151885. Dengan $du = 1,758$ dan $4-du = 2,242$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Pengujian statistik atau uji hipotesis digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Berdasarkan pengolahan data diperoleh estimasi regresi data panel sebagai berikut:

a. Analisis Regresi Data Panel

Tabel 6
Hasil Estimasi Regresi Data Panel Pendekatan Random Effect

Dependent Variable: TK
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 11/19/22 Time: 11:35
 Sample: 2017 2021
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 15
 Total panel (balanced) observations: 75
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	60.55485	4.302417	14.07461	0.0000
PDRB	-0.055367	0.026928	-2.056153	0.0434
TPT	0.172064	0.058351	2.948802	0.0043
IPM	-0.696055	0.062825	-11.07934	0.0000
Effects Specification			S.D.	Rho
Cross-section random			3.500711	0.9921
Idiosyncratic random			0.312745	0.0079
Weighted Statistics				
R-squared	0.644872	Mean dependent var	0.492925	
Adjusted R-squared	0.629867	S.D. dependent var	0.521827	
S.E. of regression	0.317472	Sum squared resid	7.155976	
F-statistic	42.97598	Durbin-Watson stat	1.393654	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.130561	Mean dependent var	12.34747	
Sum squared resid	981.4980	Durbin-Watson stat	0.010161	

Sumber: Output EViews

11. Uji t Variabel Control of Corruption

a. Hubungan antara PDRB per Kapita terhadap Tingkat Kemiskinan

Dari hasil estimasi model REM didapatkan nilai koefisien pengaruh variabel PDRB per kapita sebesar -0,055367 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara PDRB per kapita terhadap tingkat kemiskinan yang ditunjukkan pada nilai koefisien yang berarti bahwa setiap kenaikan dari PDRB per kapita sebesar 1 (Juta) menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar -0,055367 (persen). Hasil diatas menunjukkan hubungan yang sesuai dengan teori dan hipotesis karena peningkatan PDRB per kapita dimaknakan sebagai peningkatan kesejahteraan.

b. Hubungan TPT terhadap Tingkat Kemiskinan

Dari hasil estimasi model REM didapatkan nilai koefisien pengaruh variabel tingkat pengangguran terbuka sebesar 0.172064 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat kemiskinan yang ditunjukkan pada nilai koefisien yang berarti bahwa setiap peningkatan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1 (persen) menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan sebesar 0.172064 (persen). Hasil diatas menunjukkan hubungan yang sesuai dengan teori dan hipotesis karena peningkatan tingkat pengangguran terbuka dapat dimaknai

sebagai penurunan produktivitas penduduk yang dapat menurunkan tingkat pendapatan dan meningkatkan tingkat kemiskinan.

c. Hubungan antara IPM terhadap Tingkat Kemiskinan

Dari hasil estimasi model REM didapatkan nilai koefisien pengaruh variabel indeks pembangunan manusia sebesar -0.696055 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat kemiskinan yang ditunjukkan pada nilai koefisien yang berarti bahwa setiap peningkatan indeks pembangunan manusia sebesar 1 (indeks) menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar -0.696055 (persen). Hasil diatas menunjukkan hubungan yang sesuai dengan teori dan hipotesis karena peningkatan indeks pembangunan manusia dapat dimaknai sebagai peningkatan kualitas SDM di wilayah tersebut yang dapat meningkatkan daya serap tenaga kerja serta meningkatkan tingkat produktivitas serta pendapatan dan menurunkan tingkat kemiskinan.

12. Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Dari hasil estimasi Uji f (Simultan) didapat nilai probabilitas F-statistic sebesar $0,0000 < \alpha = 5\% (0,05)$ yang menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (tingkat kemiskinan).

Tabel 8
Hasil Uji Simultan (Uji F)

R-squared	0.644872	Mean dependent var	0.492925
Adjusted R-squared	0.629867	S.D. dependent var	0.521827
S.E. of regression	0.317472	Sum squared resid	7.155976
F-statistic	42.97598	Durbin-Watson stat	1.393654
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output EViews 10

13. Koefisien Determinasi (R²)

Dari hasil estimasi didapat nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0.644872 yang menunjukkan dalam penelitian ini variabel bebas menjelaskan sebesar 64,72% terhadap variabel terikat (tingkat kemiskinan) dan sisanya 35,28% dijelaskan oleh variabel lain atau faktor lain diluar model.

1). PDRB terhadap Kemiskinan

Nilai koefisien 0.0553 dan bertanda negatif, menyatakan bahwa bentuk hubungan PDRB terhadap kemiskinan adalah berbanding terbalik yang berarti bahwa peningkatan faktor PDRB sebesar 1 juta rupiah akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0.0553 (persen). Tetapi dalam penelitian ini, uji pengaruh signifikan, artinya PDRB mempengaruhi kemiskinan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Alhudhori, 2017), (Zuhdiyaty & Kaluge, 2017), dan (Rahayu, 2018) dimana dalam penelitian mereka menemukan bahwa PDRB memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian ini pula sesuai dengan temuan dari (Suliswanto, 2010) bahwa pertumbuhan ekonomi belum dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan dikarenakan pola dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu terjadinya ketimpangan. Sejak

tahun 1998, pertumbuhan bukan saja berjalan dengan tingkat yang lebih rendah, tetapi juga menjadi semakin kurang merata. Sehingga Jumlah penduduk miskin tidak akan dapat dikurangi secara signifikan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi orang miskin. Pada periode setelah krisis, berkurangnya penduduk miskin lebih banyak disebabkan karena membaiknya stabilitas ekonomi dan turunnya harga bahan makanan.

Dasar teori dari hasil regresi juga mengikuti hipotesis Kuznet dalam (Purnama, 2017) yang menyatakan bahwa pada awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan pada saat akhir jumlah orang miskin berangsur berkurang. PDRB merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat perkembangan dan struktur perekonomian di suatu daerah.

2). Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan

Nilai koefisien 0.172 bertanda positif dan signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan pengangguran terhadap kemiskinan adalah berbanding lurus yang berarti bahwa peningkatan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1 (persen) akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0.172 (persen).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Alhudhori, 2017), (Rahayu, 2018) dan (Leonita & Sari, 2019) dimana dalam penelitian mereka menyimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Umumnya individu yang menganggur tentunya tidak memiliki pendapatan dari pekerjaan. Kebutuhan masyarakat yang banyak dan beragam membuat mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, hal yang dilakukan adalah bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Jika mereka tidak bekerja atau menganggur, konsekuensinya adalah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik. Ketika kebutuhan tidak terpenuhi dampaknya mereka masuk dalam kategori penduduk miskin serta mengakibatkan membengkaknya jumlah penduduk miskin yang ada.

Pengangguran mempunyai dampak yang sangat buruk bagi masyarakat. Banyaknya pengangguran jika berlangsung secara terus menerus maka akan berdampak terhadap kondisi perekonomian. Dimana keadaan kemiskinan yang diakibatkan oleh pengangguran menimbulkan efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan.

3). IPM terhadap Kemiskinan

Nilai koefisien 0.696 dan bertanda negatif dan signifikan, menyatakan bahwa bentuk hubungan IPM terhadap

kemiskinan adalah berbanding terbalik yang berarti bahwa peningkatan faktor PDRB sebesar 1 juta rupiah akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,696 (persen).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Zuhdiyaty & Kaluge (2017), dan (Rahayu, 2018) dimana dalam penelitian mereka menyimpulkan bahwa IPM memiliki pengaruh yang negatif namun signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas sumber daya manusia dapat menjadi faktor penyebab utama terjadinya kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari tiga komponen yang berhubungan dengan tingkat produktifitas masyarakatnya. Dengan masyarakat yang sehat dan berpendidikan, produktifitas masyarakat akan meningkat dan akan meningkatkan pula pengeluaran untuk konsumsinya. Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan IPM dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuannya dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahliannya akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Disisi lain, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berakibat

pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Rendahnya produktivitas berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka didapatkan kesimpulan dari Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, TPT dan IPM terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung 2017-2021, yaitu sebagai berikut: a). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB Perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung 2017-2021. b). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung 2017-2021. c). Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung 2017-2021. d). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan IPM memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan atau secara bersama-sama terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung 2017-2021.

Bibliografi

Adriyanto, A., Prasetyo, D., & Khodijah, R. (2020). Angkatan Kerja dan Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 11(2), 66–82.

Alhudhori, M. (2017). Pengaruh IPM, PDRB dan jumlah pengangguran terhadap penduduk miskin di Provinsi Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 1(1), 113–124.

Choirur, R. (2021). The Effect of Education and Unemployment on Poverty in Jambi Province. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(01), 31–43.

Ferezagia, D. V. (2018). Analisis tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1).

Ginting, A. M., & Dewi, G. P. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Sektor Keuangan terhadap Pengurangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 4(2), 117–130.

Hanum, N., & Sarlia, S. (2019). Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Konsumsi Di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 65–73.

Latuconsina, Z. M. Y. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia Kabupaten Malang berbasis pendekatan perwilayahan dan regresi panel. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)*, 1(2), 202–216.

Leonita, L., & Sari, R. K. (2019). Pengaruh PDRB, Pengangguran, dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*. Vol. 3 No. 2 Oktober 2019, 1–8.

Made, P. I., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2016). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 4(1).

Maulidah, F., & Soejoto, A. (2015). Pengaruh tingkat pendidikan, pendapatan dan konsumsi terhadap

- jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 3(2), 227–240.
- Purnama, N. I. (2017). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomikawan*, 17(1), 163054.
- Rahayu, Y. (2018). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia, PDRB per kapita, dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 2(1), 165–174.
- Safitri, I., & Aliasuddin, A. (2016). Pengaruh Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 56–65.
- Sisnita, A., & Prawoto, N. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung (Periode 2009-2015). *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 1(1), 1–7.
- Suharyanto, A., Siagian, D. A., Juanda, J., Panjaitan, S. P., Tanjung, S., & Situmorang, T. C. M. (2017). Persepsi Masyarakat Nelayan mengenai Pendidikan di Desa Paluh Kurau, Hampan Perak, Deli serdang. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 3(1), 11–18.
- Suliswanto, M. S. W. (2010). Pengaruh produk domestik bruto (PDB) dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap angka kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 357–366.
- Yacoub, Y. (2013). *Pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*.
- Zuhdiyaty, N., & Kaluge, D. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11(2), 27–31.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).